

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdal. (2025). *Kebijakan Publik (konsep, teori dan implementasi kebijakan)*. Penerbit Widina.
- Bura, A.F., Mantiri, J., Siwi, C. M., & Rantung, M. (2023). *Pemerintah Daerah Konsep Teori dan Karakteristik*. CV. Eureka Media Aksara.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University press.
- Kertati, I., Harsoyo, & Pratomo, S. D. (2023). *Implementasi kebijakan publik: dari Hulu ke Hilir*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Askara.
- Nour Sriyanah, S. E. (2023). *Buku Ajar Keperawatan Anak*. Omera Pustaka.
- Novita sari, M., Neherta, M., Fajria, L. (2025). *Faktor Penyebab Orang tua Melakukan Kekerasan Pada Anak* (M. B. Neherta (ed.); Penerbit A).
- Sandu siyoto, & M. ali sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sinaga, L. V. (2024). *Hukum Perlindungan Anak & Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Zifatma Jawa.
- Sobirin. (2023). *Implementasi Kebijakan (Studi Kasus, Teori, dan Aplikasinya)*. Chakti Pustaka Indonesia.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulila, I. (2015). *Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Deepublish.
- Supardin, A. H. L. (2024). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Takaza Innovatix Labs.
- Suryani, L., & Nirwana, N. puspa. (2025). *kebijakan Hukum Dan Perlindungan Anak*. Deepublish.
- Widjaja, H. (2010). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Wulandari, D. novit., Iqbal, M., & nur ahmad widiantoro. (2025). *Meningkatkan Implementasi Kebijaka Publik Melalui Reformasi Perizinan*. Feniks Muda Sejahtera.

JURNAL

- Ahamd, F. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. *Journal Of Social Science Research*, 4(3), 5–24.
- Aryani, D. I., Elhada, N. I., & Anak, K. T. (2021). kekerasan Terhadap Anak : Strategi Pencegahan dan Penanggulangannya. 4(2), 171–189.
- Hasanah, D., Hendrayady, A., & Adiputra, Y. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dalam Menangani Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kota Tanjungpinang. *Student Online Jurnal*, 2(1), 57–67.
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman Vol.*, 8(1), 22–33.
- Imronah. (2009). Implementasi kebijakan: persepektif, model dan kriteria pengukurannya. *Gema Eksos*, 4(1), 54–67.
- Maharani, D. S., Nazaki, N., & Sophia, U. (2024). Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Pendampingan Korban Pelecehan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(3), 1365–1382.
- Mendrofa, R., Pembinaan, U., Indonesia, M., Publik, K., & Administrasi, T. (2024). Implementasi kebijakan publik serta terhadap kepentingan publik berdasarkan teori administrasi negara saat ini. *Genta Mulia*, 15(1), 387–392.
- Mulia astuti, ahmad suhendi. (2025). Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak *Implementation of Welfare and Child Protection Policie*. 4(200), 215–235.
- Musi, M. A., Makassar, U. N., Pembelajaran, I., Alam, B., Usia, A., & Implementation, L. (2025). Open Access Implementasi Pembelajaran Berbasis Alam Bagi Anak Usia Dini *Implementation of Nature-Based Learning For Childhood*. 02(01), 358–366.
- Prastini, E. (2024). kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di indonesia. *Jurnal Studi Media Dan Komukasi Indonesia*, 4(2), 89–103.
- Purba, A. M., & Fharadila, A. E. (2024). Peran Puspaga Gurindam Kepri Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Tanjungpinang. *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 7(1), 930–939.
- Riadi, Y. S. (2022). Implementasi Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang. *Tanah Pilih*, 2(1), 47–61.
- Rinah, S. A. (2023). Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang, Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak, 7(1), 1-10.

- Sri Ambar Rinah, Fitri Dewi Wulandari, M. P. (2022). Evaluasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji STISIPOL*, 3(2), 773-786.
- Sumiati, Imam Suyitno, & Bakhtiar. (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Anak Di Kota Makassar (Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak). *SEMAR : Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(01), 23–35.
- Suryani, N. A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana*. 2, 134–145.
- Susanto, P. C., Arini, D. U., Yuntina, L., & Panatap, J. (2024). *Konsep Penelitian Kuantitatif : Populasi , Sampel , dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)*. 3(1), 1–12.
- Syahwa, D. A., Maritim, U., & Ali, R. (2023). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Pada Perempuan Di Kota Tanjungpinang. *Dunia Hukum Dan Politik*, 1(3), 179-192
- Utami, P. N., & Primawardani, Y. (2022). Efforts to Prevent Violence Against Indonesian Children. *Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan, Semnaskum*, 1–6.

WEBSITE

- 59 Kasus Kekerasan Anak Tercatat di Kota Tanjungpinang, Mayoritas Korban pelecehan Seksual. (2025). Ulasan. Co. Tersedia pada: <https://share.google/JIFUIPu28GEO6nKWh> (Diakses 6 Desember 2025).
- SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). (2025). Tersedia pada: <https://simfoni.kemenpppa.go.id> (Diakses 25 September 2025)
- Weni Lis Darmansyah Ajak Sinergi Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Tanjungpinang. (2025). Tersedia pada: <https://share.google/MqaBKvkhKGmlaCQog> (Diakses 6 desember 2025)

DOKUMEN

Hartanto, B. (2024). *LAKIP 2024 (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG* (p. 101).

Pemerintah Pusat Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. (2016).

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Ana. (2014).

SKRIPSI

Hutapea, D. F. (2023). Upaya Advokasi UPTD PPA dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik Terhadap Perempuan (Studi Kasus Wilayah Kota Tanjungpinang). Maritim Raja Ali Haji.

Nur Azizah Hasibuan, A. (2024). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Pada UPT PPA DP3APM Kota Medan.